

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan dari hasil – hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain :

Meneliti tentang indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data panel yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, variabel independen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, dan belanja daerah sedangkan variabel dependennya yaitu indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masing – masing pengaruh variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil estimasi data memberikan kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali, kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali, dan belanja daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Bali (Adelfina and Jember, 2013).

Meneliti tentang indeks pembangunan manusia di provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data time series, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, dengan teknik analisis regresi linier berganda, variabel independen yang

digunakan yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal sedangkan variabel dependennya yaitu indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masing – masing pengaruh variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil estimasi data memberikan kesimpulan bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali sedangkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali (Sari and Supadmi, 2016).

Meneliti tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data panel yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, variabel independen yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel dependennya yaitu indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masing – masing pengaruh variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil estimasi data memberikan kesimpulan bahwa variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM (Desrindra et al., 2016).

Meneliti tentang indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data panel yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, variabel independen yang digunakan yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal, sedangkan variabel dependennya yaitu indeks pembangunan

manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masing – masing pengaruh variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil estimasi data memberikan kesimpulan bahwa variabel kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah (Mirza, 2012).

Meneliti tentang indeks pembangunan manusia di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, variabel independen yang digunakan yaitu jumlah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan teknologi sedangkan variabel dependennya yaitu indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masing – masing pengaruh variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Dari hasil estimasi data memberikan kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, teknologi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia (Maulana and Bowo, 2013).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran

kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2017).

Menurut Feriyanto (2014), Perhitungan IPM dapat dilakukan untuk setiap tahun dan manfaat perhitungan IPM di antaranya adalah:

- 1) Sebagai salah satu indikator untuk perbandingan relatif kinerja antar daerah di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk menentukan peringkat provinsi dan kabupaten/kota dalam keberhasilan pembangunan manusia di wilayahnya.
- 2) Sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah baik secara total (IPM) ataupun perkembangan indeks masing – masing komponen IPM.
- 3) Sebagai dasar kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar terpacu menaikkan peringkatnya, melalui pemanfaatan sumber daya dan penentuan prioritas program peningkatan kualitas hidup manusia.

- 4) Sebagai salah satu kriteria untuk penentuan besarnya alokasi dana bantuan pembangunan manusia dari pusat ke daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- 5) Sebagai indikator kajian untuk mengukur kinerja kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah terkait dengan hasil – hasil pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kesehatan masyarakat dan lainnya.

Beberapa indikator IPM lama yang dirubah sebagai berikut :

1. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Perbedaan metode perhitungan IPM lama dan IPM baru yaitu :

1. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometric.

Beberapa keunggulan dari IPM metode baru yaitu :

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

1. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

2. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya (BPS, 2017).

2.2.2 Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan dikarenakan belum memiliki kemampuan, baik kemampuan dalam faktor produksi maupun kualitas faktor produksi. Selain itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan dapat disebabkan oleh sifat alamiah yaitu masalah tentang pemilihan faktor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri (Subandi, 2016).

Menurut Subandi (2016), ukuran kemiskinan meliputi 2 hal :

- 1) Kemiskinan absolut, adalah bila pendapatan seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan hidup minimum (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan).
- 2) Kemiskinan relatif, adalah di mana sebenarnya pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan minimum, namun masih dianggap

miskin karena pendapatannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal di bidang produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti jumlah produksi barang industri, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Data yang digunakan untuk memberikan gambaran kasar mengenai

pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara ialah dengan melihat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011).

Menurut Subandi (2016), ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat meliputi :

- 1) Akumulasi Modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan sumber daya manusia (*human resources*).
- 2) Pertumbuhan penduduk dan hal – hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) yang secara umum dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kemajuan teknologi, merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu : netral, hemat tenaga kerja (*labor saving*), dan hemat modal (*capital saving*).

2.2.4 Pendidikan

Beberapa pengertian menurut Badan Pusat Statistik (2017), Pendidikan merupakan hal penting dari terciptanya pembangunan manusia. Tanpa adanya pendidikan kualitas sumber daya manusia dianggap tidak memenuhi syarat dalam meningkatkan pembangunan manusia. Suatu negara dianggap mengalami kemajuan salah satunya dilihat dari segi pendidikan di negara tersebut. Jika suatu negara memiliki pendidikan yang baik maka negara tersebut akan mengalami kemajuan, sedangkan bila pendidikan menurun maka hal tersebut dapat berpengaruh buruk bagi negaranya.

Bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), instansi lainnya negeri maupun swasta.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT, sedangkan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Tidak/ belum pernah sekolah adalah tidak/ belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/ belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/ tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda

tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) dalam perhitungan IPM, komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sedangkan rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan di manfaatkan oleh pemerintah daerah guna dalam membiayai program – program pemerintah daerah dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2012).

Menurut Sjafrizal (2012), Ada beberapa komponen yang mencakup dalam PAD yaitu:

- 1) Pajak Daerah ; Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain – lainnya.
- 2) Retribusi Daerah.
- 3) Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lainnya yang sah.

2.2.6 Belanja Daerah

Menurut BPS (2015), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung

Belanja Tak Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
- h. Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja langsung terdiri dari :

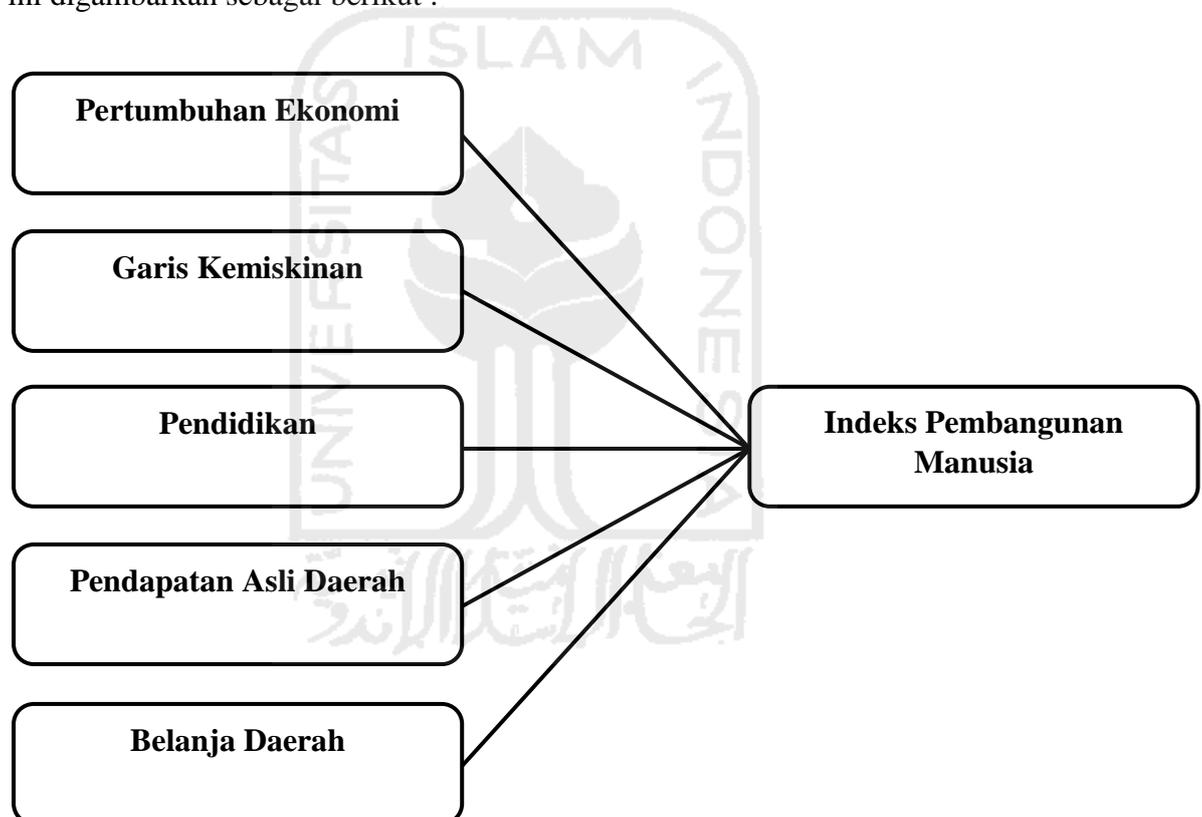
- a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, faktor-faktor yang mempengaruhi landasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2. Diduga Garis Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Diduga Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Diduga Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.